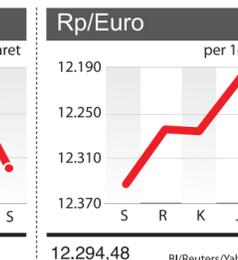
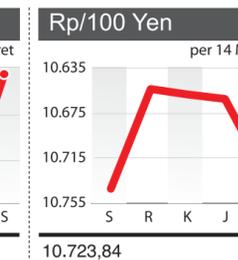
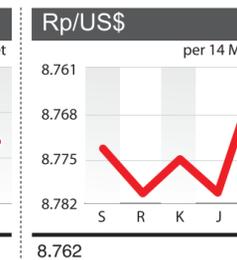
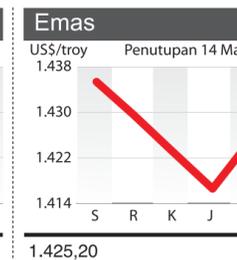
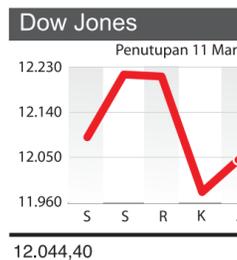
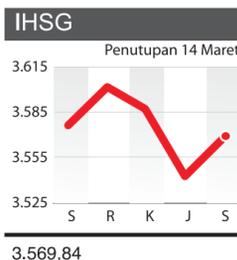
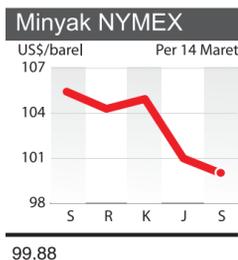




Kiprah Kaum Hawa dalam Revolusi Arab

Perempuan berperan sebagai pionir pada revolusi yang menghancurkan status quo di Timteng dan Afrika Utara.

Fokus Internasional, Hlm 22-23



Pemerintah Yakin Bisa Jaga Inflasi

PEMERINTAH tetap percaya diri mampu mengendalikan inflasi meski terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia akibat gejolak politik di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Kurs rupiah yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diyakini dapat mengatasi tingginya harga minyak dunia yang kini terus bertengger di atas level US\$100 per barel.

Hal itu dikatakan Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sesuai rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

"Bulan-bulan terakhir justru terjadi inflasi rendah akibat harga beberapa komoditas pangan yang cenderung turun. Kami melihat pada bulan-bulan depan justru akan deflasi."

Hatta mencontohkan, harga beras kemarin turun Rp100 per liter di Pasar Induk Cipinang. Begitu pula harga komoditas pangan lain cenderung turun. Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga agar kenaikan harga tidak terjadi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan sepakat bahwa sepanjang tiga bulan terakhir, inflasi berada pada tingkat yang rendah karena musim panen raya.

Harapan kita, meski ada gejolak di luar negeri, ada langkah-langkah efektif untuk meminimalkan dampak."

SB Yudhoyono
Presiden RI

Kecenderungan ke depan, menurut Rusman, inflasi akan tetap rendah dan diharapkan justru terjadi deflasi karena harga berbagai komoditas pangan mengalami tren penurunan. Februari lalu inflasi hanya 0,13%, juga ditopang meredanya gejolak harga pangan.

Rapat kabinet terbatas yang diikuti seluruh menteri bidang ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustian, dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan itu, selain membahas inflasi, membicarakan ketahanan pangan dan energi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pembantunya agar tetap berkonsentrasi dalam mengatasi dampak ekonomi dari gejolak yang terjadi di luar negeri.

"Harapan kita, meski ada gejolak di luar negeri, ada langkah-langkah efektif untuk meminimalkan dampak itu sehingga tidak memukul kehidupan rakyat dan perekonomian kita," kata Presiden. (Nav/Ant/E-2)

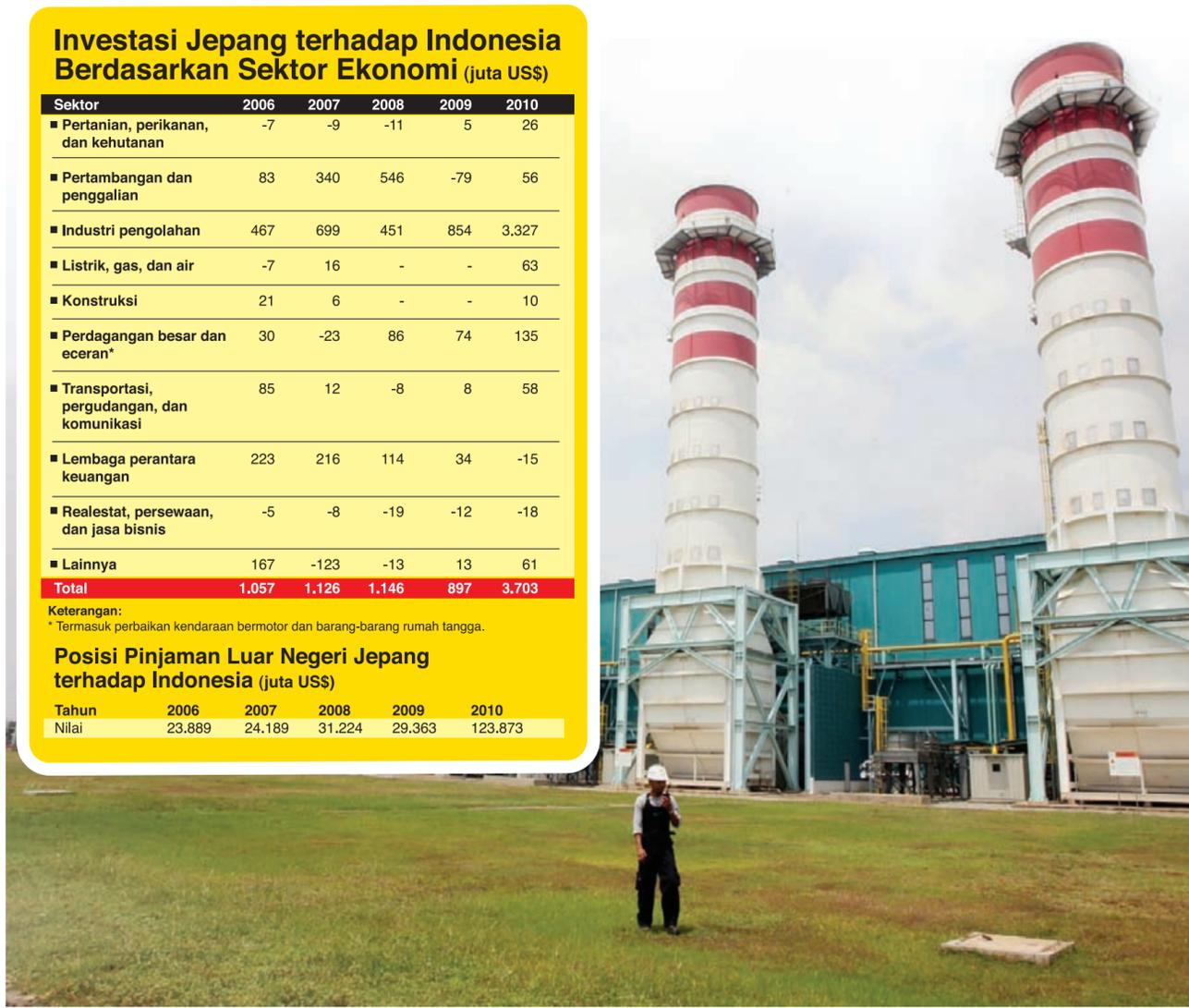
Investasi Jepang terhadap Indonesia Berdasarkan Sektor Ekonomi (juta US\$)

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
■ Pertanian, perikanan, dan kehutanan	-7	-9	-11	5	26
■ Pertambangan dan penggalian	83	340	546	-79	56
■ Industri pengolahan	467	699	451	854	3.327
■ Listrik, gas, dan air	-7	16	-	-	63
■ Konstruksi	21	6	-	-	10
■ Perdagangan besar dan eceran*	30	-23	86	74	135
■ Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	85	12	-8	8	58
■ Lembaga perantara keuangan	223	216	114	34	-15
■ Real estat, persewaan, dan jasa bisnis	-5	-8	-19	-12	-18
■ Lainnya	167	-123	-13	13	61
Total	1.057	1.126	1.146	897	3.703

Keterangan:
* Termasuk perbaikan kendaraan bermotor dan barang-barang rumah tangga.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Jepang terhadap Indonesia (juta US\$)

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Nilai	23.889	24.189	31.224	29.363	123.873



Sumber: BIFoto: MIM IRFAN/Grafis: Fredy

Bencana di Jepang Ancam Investasi dan Pinjaman

Di lain pihak, Indonesia mungkin menjadi lokasi pemindahan produksi Jepang.

JAJANG SUMANTRI

REALISASI investasi dan pinjaman Jepang untuk Indonesia tahun ini berpotensi terhambat. Namun, di sisi lain, Jepang sangat mungkin malah memacu fasilitas-fasilitas produksi di luar negeri, termasuk Indonesia, demi menggantikan produksi dari dalam negeri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan investasi Jepang dibiayai Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang bersifat semiperintah.

"Mereka tentu mengutamakan percepatan pemulihan ekonomi di dalam negeri Jepang sehingga investasi ke luar tertunda. Dengan situasi seperti ini, pasar mereka juga

terganggu," tuturnya di Jakarta, kemarin.

Hidayat mengungkapkan, pada 2011 komitmen investasi Jepang mencapai US\$15 miliar (sekitar Rp135 triliun). Sebagian diperuntukkan bagi pembangunan pembangkit listrik di Jepara, Jawa Tengah, yang saat ini masih dalam proses tender, dan proyek infrastruktur di Kalimantan.

Namun, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menyatakan Jepang telah memastikan tetap menjalankan proyek investasi yang menjadi komitmen mereka.

"Saya baru *courtesy call* ke Senior Vice Minister of Finance Fumihiko Igarashi serta Dirjen Bea dan Cukai Jepang Atsuko Shibota. Mereka bilang pro-

gram dan proyek yang mereka usulkan di Indonesia seperti Jakarta Metropolitan Area tetap jalan," katanya melalui pesan singkat, langsung dari Tokyo, kemarin.

Bahkan, Director of Information Management Office dari Biro Kepabeanan dan Tarif Osamu Mizui mengemukakan adanya kemungkinan pemindahan sementara produksi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Pemindahan tersebut antara lain untuk produksi komponen dan bahan baku.

Bencana gempa dan tsunami yang dialami Jepang juga berpotensi menurunkan volume perdagangan dengan Indonesia dalam jangka pendek. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengungkapkan kemungkinan itu masih ada meskipun Sendai—kota pelabuhan yang paling parah terkena dampak bencana—bukan pintu masuk utama Jepang.

"Pintu masuk utama adalah Pelabuhan Yokohama dan Osaka. Namun pasti perdagangan terganggu. Di lain pihak, interkoneksi Jepang luar biasa baiknya. Saya yakin mereka bisa pindah ke pintu masuk lainnya."

Jepang ialah negara tujuan ekspor terbesar RI sepanjang 2010 dan kedua terbesar setelah Amerika Serikat di Januari 2011. Negara itu juga negara asal impor RI nomor dua terbesar setelah China.

Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan Indonesia siap menambah 20 kargo ekspor gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) ke Jepang.

Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan negara yang kehilangan hampir separuh pasokan energi listriknya tersebut akibat penonaktifan reaktor nuklir di Fukushima.

Pinjaman terancam

Tidak hanya investasi dan perdagangan, bencana di Jepang juga dikawatirkan mengganggu penyaluran komitmen pinjaman ke RI. Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan mewaspadai gangguan itu.

Menurutnya, kerugian Jepang tidak terlalu besar ketimbang volume ekonomi 'Negeri Sakura' itu. Namun, bahaya ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir membuat risiko gangguan ekonomi di negara kreditur terbesar bagi RI itu menjadi tinggi.

Menurut Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Maurin Sitorus, komitmen Jepang 2011 untuk pinjaman proyek 73,942 miliar yen (sekitar Rp7,2 triliun). Sedangkan untuk pinjaman program US\$200 juta. (Tup/SZ/E-1)

jajang@mediaindonesia.com

EKONOMIKA

Asian Agri-GPCS Garap Biogas

PENGEMBANG proyek kredit karbon bertaraf internasional, Genpower Carbon Solutions LP (GPCS) dan Asian Agri Group (AAG), menandatangani kesepakatan proyek biogas *clean development mechanism* (CDM).

"GPCS merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Asian Agri dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan energi bersih," jelas CEO GPCS Guillermo Espiga dalam siaran pers, kemarin.

Dalam kesepakatan ini, GPCS akan mengembangkan sebuah sistem biodigester tangki beton yang menyatukan sistem pembuangan kilang minyak kelapa sawit di dua kilang milik AAG di Sumatera Utara. Dengan sistem tersebut, gas buang yang dihasilkan akan dialirkan kembali ke kilang sebagai bahan bakar yang bersih. (* /E-2)

First Media Cari Investor Strategis

PT First Media Tbk (KBLV) tengah melakukan penjajakan dengan beberapa calon investor global dalam rangka ekspansi perluasan jaringan. Perseroan membutuhkan dana hingga US\$150 juta untuk meningkatkan jaringan kabel optik dari 500 ribu *home passed* menjadi 1 juta *home passed* pada 2015.

"Saat ini kami tengah berbicara intensif dengan beberapa investor global untuk menjajaki kerja sama strategis," kata Presiden Komisaris First Media Peter Gontha di Jakarta, kemarin.

Selain meningkatkan jaringan kabel optik, perseroan berniat menambah *base transceiver station* (BTS) untuk mendukung layanan internet. Saat ini, perseroan memiliki 140 BTS dan ditargetkan menjadi 200 BTS pada April 2011. (Atp/E-2)

Sumur Tua akan Dioptimalkan

PEMERINTAH akan mengoptimalkan produksi lapangan-lapangan minyak tua sebagai antisipasi produksi minyak nasional (*lifting*) yang diperkirakan tidak mampu mencapai target harian 970 ribu barel per hari (bph).

Menurut Kepala Kelembagaan dan Humas BP Migas Gde Pradnyana, jumlah lapangan minyak tua di Indonesia cukup banyak. "Sumur tua di Indonesia jumlahnya mencapai 10 ribu. Kalau satu sumur itu memproduksi 1-2 barel per hari, berarti ada tambahan 10 ribu barel," ujarnya, kemarin.

Pemerintah, setidaknya membutuhkan biaya sekitar US\$250 ribu-US\$300 ribu untuk mengangkut emas hitam dari 10 ribu lapangan itu dengan asumsi satu lapangan perlu biaya US\$25-US\$30. (Atp/E-2)

Revisi Bea Masuk tidak Bersifat Surut

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, revisi bea masuk untuk impor bahan baku dan barang modal tidak berlaku surut.

Untuk itu, Kementerian Keuangan diminta segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 241/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor agar kewajiban industri

tidak terus membesar.

"Bila sudah disetujui namun belum diterbitkan (revisinya), tentu industri harus terus membayar itu," kata Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklan, dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala, akhir pekan lalu.

Ia pun berharap Kementerian Keuangan segera menerbitkan hasil revisi PMK 241 itu untuk menghindari terus bertambah-

nya biaya yang dibayarkan industri untuk bea masuk itu.

"Aturannya memang bersifat surut, jadi mereka yang sudah membayar tidak akan mendapatkan pengembalian (restitusi)," ujarnya.

Akhir pekan lalu, pemerintah sepakat untuk merevisi bea masuk bagi 190 pos tarif barang impor nonpangan. Dengan revisi kedua kalinya atas PMK 241 tersebut, 182 pos tarif

akan dikenai bea masuk 0%. Pembebasan itu meliputi sektor kimia, permesinan, elektronika, perkapalan, dan perfilman.

Sementara itu, sembilan pos tarif lainnya dikenai bea masuk dengan besaran sebelum PMK tertanggal 22 Desember itu terbit, misalnya produk ikan kalengan, atau permen. "Kita memfasilitasi usulan revisi ini untuk mendukung daya saing industri, khususnya bagi mere-

ka yang sangat membutuhkan bahan baku," kata Arryanto.

Pada Januari lalu, pemerintah telah merevisi PMK 241 dengan membebaskan bea masuk 57 komoditas terkait pangan.

Sementara itu, ekonom Universitas Atmajaya A Prasetyanto mengatakan pemerintah perlu mempertegas pemetaan industri yang benar-benar membutuhkan pembebasan bea masuk. (Jaz/E-3)